

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

1. Gambaran Umum

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota provinsi Lampung, Indonesia. Kota ini memiliki luas 207,50 km² dengan populasi penduduk sebanyak 879.651 jiwa (sensus 2010); kepadatan penduduk 4.597 jiwa/km² dan tingkat pertumbuhan penduduk 3,79 % per tahun. Secara geografis, ibukota provinsi Lampung ini berada di pintu gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut DKI Jakarta.

Didukung oleh posisi yang strategis, menyebabkan mobilitas penduduk serta lalu lintas di setiap ruas jalan protokol di Bandar Lampung cenderung padat, sehingga sebagai salah satu kota tersibuk di Indonesia bagian barat, Bandar Lampung memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung. Oleh karena itu Kota Bandar Lampung merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial politik, pendidikan dan kebudayaan, serta merupakan pusat kegiatan perekonomian dari Provinsi Lampung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 tahun 2012 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan

dalam Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung menjadi 20 Kecamatan dengan 126 Kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Kedaton
2. Kecamatan Sukarame
3. Kecamatan Tanjungkarang Barat
4. Kecamatan Panjang
5. Kecamatan Tanjungkarang Timur
6. Kecamatan Tanjungkarang Pusat
7. Kecamatan Telukbetung Selatan
8. Kecamatan Telukbetung Barat
9. Kecamatan Telukbetung Utara
10. Kecamatan Rajabasa
11. Kecamatan Tanjung Seneng
12. Kecamatan Sukabumi
13. Kecamatan Kemiling
14. Kecamatan Labuhan Ratu
15. Kecamatan Way Halim
16. Kecamatan Langkapura
17. Kecamatan Enggal
18. Kecamatan Kedamaian
19. Kecamatan Telukbetung Timur
20. Kecamatan Bumi Waras

Luas wilayah Kota Bandar Lampung mencapai 192,96 Km². Wilayah Kota Bandar Lampung merupakan daerah perkotaan yang terus berkembang dari daerah tengah ke daerah pinggiran kota yang ditunjang fasilitas perhubungan dan

penerangan. Pengembangan kota ditandai dengan tumbuhnya kawasan permukiman, namun demikian daerah pinggiran belum terlihat jelas ciri perkotaannya. Pada tahun 2001 Kota Bandar Lampung dimekarkan dari 9 Kecamatan dan 84 kelurahan menjadi 13 kecamatan dan 98 kelurahan.

Letak yang strategis menjadikan daerah ini sebagai daerah transit kegiatan perekonomian antara pulau jawa. Secara geografis kota bandar lampun terletak pada kedudukan 5020' sampai dengan 5030' lintang selatan dan 105028' sampai dengan 105037' bujur timur. Letak tersebut berada di teluk lampung dan diujung selatan pulau sumatera, yang memiliki luas wilayah 192,18 Km² terdiri dari 13 kecamatan dan 98 kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kotamadya Lampung Selatan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Ketibung Kotamadya Lampung Selatan serta Teluk Lampung
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kotamadya Lampung Selatan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kotamadya Lampung Selatan.

2. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Kota Bandar Lampung sama halnya dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, adalah masyarakat yang agamis. Mereka taat dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya sebagian besar memeluk agama Islam, memegang teguh adat istiadat leluhur, terbuka pada perubahan dan pembaharuan serta tinggi sifat kekeluargaan dan gotong royong. Tradisi yang dominan

berkembang di Kota Bandar Lampung adalah Budaya gotong royong meskipun ada proses akulturasi dengan tradisi Lampung, Padang, Jawa dan lain sebagainya. Sebagian besar penduduk Kota Bandar Lampung berasal dari suku Lampung disamping suku-suku lainnya seperti Padang, Jawa dan lain-lain. Dalam perkembangannya budaya yang berkembang di Kota Bandar Lampung juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam.

3. Kondisi Perekonomian

Kontribusi yang cukup signifikan membangun perekonomian Kota Bandar Lampung yaitu sektor industri pengolahan dan penggalian (29,82%), kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (22,78%), sektor jasa-jasa (14%), sektor pengangkutan dan komunikasi (13,23%). Sedangkan sektor lainnya (20,17%) meliputi sektor pertambangan, pertanian, bangunan listrik, dan gas rata-rata 3-4%. Dari sisi penerimaan APBD Kota Bandar Lampung pada tahun 2009, penerimaan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan merupakan yang terbesar yaitu sekitar 87% atau sekitar 181,1 milyar dari sekitar 206,9 milyar, sedangkan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah menyumbang sekitar 9% atau sekitar 19,4 milyar. Sedangkan penerimaan lain yaitu sebesar 6,3 milyar yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu. Dari sisi pengeluaran, anggaran terbesar, diperuntukkan bagi belanja rutin yaitu hampir sekitar 80% atau sekitar 163,6 milyar, sedangkan untuk belanja pembangunan, dialokasikan hanya sebesar 43,3 milyar atau sekitar 20%.

Alokasi dana pembangunan yang cukup kecil dibandingkan dengan alokasi untuk belanja rutin, salah satu pertimbangan yang dipakai dalam menentukan kebijakan pengelolaan anggaran belanja seperti sebagai berikut; Belanja

pembangunan difokuskan pada sektor yang bersifat *cost recovery*. Penerimaan PAD kota Bandar Lampung perlu ditingkatkan seiring dengan berlakunya UU tentang Otonomi Daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendanaan yang selama ini ada, selain berusaha menciptakan sumber-sumber pendanaan baru, baik dari penerimaan sektor pajak maupun perusahaan daerah.

4. Kondisi Pemerintahan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintah daerah otonom menurut asas desentralisasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung selaku lembaga legiaslatif, sesuai dengan proporsi jumlah penduduk maka anggota DPRD Kota Bandar Lampung berjumlah 85 orang. Sedangkan lembaga eksekutif di Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Kepala Daerah/Walikota. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang membawahi 3 Asisten, 10 Bagian, 33 Sub Bagian, 17 Dinas, 6 Badan, 3 Kantor, 1 UPTD, 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan.

Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan dan 126 (seratus dua puluh enam) Kelurahan, dan sebagai Ibukota Provinsi Lampung Kota

Bandar Lampung merupakan pusat dari semua kegiatan, baik dibidang pemerintahan, sosial, politik, pendidikan, kebudayaan maupun perekonomian yang secara ekonomis sangat menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan daerah.

B. Gambaran Umum Dinas Tata Kota Bandar Lampung

1. Kedudukan Dinas Tata Kota Bandar Lampung

Dinas Tata Kota Bandar Lampung adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung. (Sumber: Dinas Tata Kota Bandar Lampung Tahun 2015)

2. Visi dan Misi Dinas Tata Kota Bandar Lampung

Visi Dinas Tata Kota Bandar Lampung adalah: “Terwujudnya Penataan Kota dengan estetika sesuai dengan Rencana Kota dan Pemberian Pelayanan Publik yang baik”. Untuk melaksanakan visi tersebut maka misi yang diemban Dinas Tata Kota Bandar Lampung adalah:

- a. Melaksanakan tertib tata ruang, tertib bangunan yang berestetika perkotaan melalui kebijaksanaan kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- b. Upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan estimasi dan perhitungan yang logis dan akurat. (Sumber: Dinas Tata Kota Bandar Lampung Tahun 2015)

3. Tujuan dan Sasaran Dinas Tata Kota Bandar Lampung

Tujuan Dinas Tata Kota Bandar Lampung adalah:

- a. Meningkatkan penataan fisik kota dan kualitas lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang.
- b. Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan berdasarkan peruntukan lahan dan memenuhi syarat-syarat konstruksi.
- c. Meningkatkan kualitas penggunaan ruang dan lahan untuk kegiatan fisik melalui penyediaan pedoman teknis informasi perencanaan pembangunan.
- d. Mewujudkan sistem pelayanan publik yang prima

Sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Tertatanya fisik kota dan lingkungan berdasarkan rencana tata ruang kota
- b. Terwujudnya tertib bangunan dan lingkungan berdasarkan ketentuan teknis melalui evaluasi, monitoring dan pengawasan.
- c. Terwujudnya kualitas ruang dan lingkungan binaan yang memenuhi standar kelayakan hidup.
- d. Tersedianya sumber daya dan infrastruktur pendukung dalam upaya penggalan penerimaan daerah (Sumber: Dinas Tata Kota Bandar Lampung Tahun 2015)

4. Kebijakan dan Program Dinas Tata Kota Bandar Lampung

Kebijakan adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun kebijakan yang ditempuh Dinas Tata Kota Bandar Lampung adalah:

- a. Penyusunan dokumen tata ruang
- b. Penataan kawasan konservasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- c. Pembuatan peta dasar dan sebaran bangunan
- d. Pengawasan, pengendalian dan penertiban tata bangunan dan ruang
- e. Sosialiasi tentang penataan ruang dan tata bangunan
- f. Menyusun pedoman hukum dan ketentuan teknis dalam bentuk juklak dan juknis pembangunan gedung dan pemanfaatan lahan.
- g. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat struktural fungsional dan penjenjangan
- h. Penyediaan sarana prasarana aparatur pemerintah

Program yang dilaksanakan Dinas Tata Kota Bandar Lampung adalah:

- a. Menyusun perencanaan dan pengembangan ruangan kota
- b. Melakukan pengendalian, monitoring dan pengawasan terhadap pemanfaatan/penataan lingkungan.
- c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan dalam pembangunan gedung dan pemanfaatan penataan lingkungan.
- d. Menyusun mekanisme dan prosedur pelayanan yang efektif dan efeasien
- e. Menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan memiliki skill dan didukung oleh infrastruktur penunjang

(Sumber: Dinas Tata Kota Bandar Lampung Tahun 2015)

5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Kota Bandar Lampung

Dinas Tata Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan penataan ruang kota.

Fungsi Dinas Tata Kota Bandar Lampung adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penataan ruang kota.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

(Sumber: Dinas Tata Kota Bandar Lampung Tahun 2015)

6. Susunan Organisasi Dinas Tata Kota Bandar Lampung

Susunan organisasi Dinas Tata Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - (1) Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi
 - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - (3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kota, membawahi:
 - (1) Seksi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang
 - (2) Seksi Pengarahan Pemanfaatan Ruang Kota
 - (3) Seksi Evaluasi Rencana dan Pengembangan Kota
- d. Bidang Pengukuran, Pemetaan dan Dokumentasi, membawahi:
 - (1) Seksi Pengukuran
 - (2) Seksi Pemetaan
 - (3) Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi

- e. Bidang Penataan Bangunan, membawahi:
 - (1) Seksi Kontruksi dan Arsitektur Bangunan
 - (2) Seksi Penelitian Fungsi Bangunan
 - (3) Seksi Pembangunan dan Pemugaran
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi:
 - (1) Seksi Pengawasan dan Pendataan Lapangan
 - (2) Seksi Pengendalian dan Penegakan Hukum
 - (3) Seksi Penyuluhan dan Pelaporan
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(Sumber: Dinas Tata Kota Bandar Lampung Tahun 2015)

7. Pegawai Dinas Tata Kota Bandar Lampung

Pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja Dinas Tata Kota Bandar Lampung didukung oleh sumber daya manusia (SDM), sebagai elemen penting yang memberikan peran dalam pencapaian hasil dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Jumlah seluruh pegawai Dinas Tata Kota Bandar Lampung adalah 105 orang. Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Tata Kota Bandar Lampung Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

No	Jenis Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan I	-
2	Golongan II	19
3	Golongan III	80
4	Golongan IV	6
Jumlah		105

Sumber: Dinas Tata Kota Bandar Lampung, Tahun 2015

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas, diketahui bahwa sebagian besar atau mayoritas pegawai Dinas Tata Kota Bandar Lampung adalah pegawai Golongan

III berjumlah 80 orang, sementara jumlah minoritas adalah pegawai Golongan IV yaitu 6 orang dan pegawai Golongan II berjumlah 19 orang. Sementara itu jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Pegawai Dinas Tata Kota Bandar Lampung Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SMU/Sederajat 32	32
2	Ahli Madya/D-3	2
3	Sarjana Strata Satu/S-1	63
4	Sarjana Strata Satu/S-1	8
Jumlah		105

Sumber: Dinas Tata Kota Bandar Lampung, Tahun 2015.

Berdasarkan data pada tabel 3 di atas, diketahui bahwa sebagian besar atau mayoritas pegawai Dinas Tata Kota Bandar Lampung adalah lulusan Sarjana Strata I yaitu berjumlah 63 orang, sementara jumlah minoritas adalah pegawai lulusan Ahli Madya/D3 yaitu 2 orang, pegawai lulusan SMA/Sederajat adalah 32 orang dan pegawai lulusan Pasca Sarjana adalah 8 orang. Selanjutnya untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Jumlah Pegawai Dinas Tata Kota Bandar Lampung Berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	20
4	Non eselon	79
Jumlah		105

Sumber: Dinas Tata Kota Bandar Lampung, Tahun 2015.

Berdasarkan data pada tabel 4 di atas, diketahui bahwa jumlah pegawai Dinas Tata Kota Bandar Lampung yang menjabat Eselon II adalah 1 orang, jumlah pegawai yang menjabat Eselon III adalah 5 orang dan jumlah pegawai yang menjabat Eselon IV adalah 20 orang sedangkan pegawai non eselon sebanyak 79 orang.

SKPD dan Dinas terkait dalam melaksanakan Implementasi implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung sudah memiliki peranan dan tugas masing-masing yaitu :

- a. Peranan Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung adalah mensosialisasikan produk hukum yaitu Perda Kota Bandar Lampung Tentang Penataan RTH kepada SKPD dan Dinas terkait untuk melaksanakan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Cara sosialisasi itu sendiri memiliki nilai yang sangat penting dalam sebuah pengimplementasian produk hukum. Sosialisasi adalah salah satu dalam faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu sebuah komunikasi agar pelaksanaan implementasi tepat sasaran.
- b. Peranan Bappeda sebagai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung Bappeda bertanggung jawab merencanakan secara matang dalam melaksanakan pembangunan Kota Bandar Lampung yang semakin tahun laju perkembangan ekonomi dan pembangunan yang semakin meningkat. Laju perkembangan ekonomi secara langsung memicu laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Bertambahnya penduduk menyebabkan lahan RTH di Kota Bandar Lampung Semakin terkikis. Peranan Bappeda di sini adalah merencanakan dan mulai membangun serta membebaskan lahan yang masih milik pemerintah Kota Bandar Lampung agar dijadikan lahan RTH yang dapat dimanfaatkan secara publik, maupun privat.
- c. Dinas Tata Kota memberikan ijin dalam sebuah pembangunan yaitu KRK (Ketentuan Rencana Kota), IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), dan HO

(Hinder Odonantie). Masyarakat dan pengembang perumahan tidak sembarangan dapat membangun sebuah kompleks permukiman. Harus memiliki kriteria tertentu sebelum membangun sebuah rumah, gedung, dan kompleks perumahan masyarakat harus memehuni syarat yang pertama harus memiliki surat Keterangan Rencana Kota yang nanti masuk dalam peta milik Dinas Tata Kota Kota Bandar Lampung Setelah memiliki surat KRK mereka diberikan surat ijin IMB yang sebelumnya telah memiliki surat KRK sebekum mendirikan sebuah bangunan. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.

- d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung berperan langsung untuk melakukan perawatan Kriteria Vegetasi yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung dengan dibantu oleh koordinasi dari Kecamatan dan Kelurahan yang masih dalam lingkup Kota Bandar Lampung. Dengan tidak terpenuhinya lahan RTH sebesar 25% dari luas wilayah Kota Bandar Lampung, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan perawatan terhadap kriteria vegetasi agar berfungsi secara maksimal.